

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilaksanakan tidak terlepas dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya sebagai perbandingan dan kajian dalam menulis penelitian ini. Adapun hasil dua hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan pendidikan inklusif.

Dinda Intan Widiasti meneliti tentang kesiapan sekolah dalam implementasi pendidikan anak berkebutuhan khusus (study deskriptif pada sekolah dasar inklusi di kota semarang tahun ajaran 2012/2013). Penelitian ini berfokus pada kesiapan sekolah dalam menyiapkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di 8 sekolah dasar kota semarang yang terdapat pendidikan inklusinya. Hasil dari penelitian ini, dinilai 8 sekolah tersebut sudah cukup siap dan mampu dalam mempraktikkan pendidikan inklusi dimasing – masing sekolahnya serta di 8 sekolah tersebut juga tenaga pengajar bagi ABK sudah mampu mendampingi ABK disetiap mata pelajaran namun dari hasil temuannya yang berkaitan dengan tenaga pengajar di 8 sekolah tersebut menunjukkan tidak semua tenaga pengajar mampu membedakan gangguan perilaku dan gangguan mental dimasing – masing diri ABK⁵.

Rindi Lelly Anggraini meneliti tentang proses pembelajaran khususnya kelas V di SD Negeri Giwangan Yogyakarta pada tahun 2014. Hasil dari penelitian ini proses pembelajaran kelas V disekolah tersebut dilakukan

⁵ Dinda Intan Widiasti, *“Tingkat Kepuasan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Disekolah Dasar Inklusi Kota Semarang”*, Univ. Negeri Semarang, 2013.

dikelas penuh atau ABK berada dikelas reguler sepanjang hari serta ada GPK yang mendampingi. Dalam melakukan pendampingan GPK dikelas V SD Negeri Giwangan Yogyakarta memiliki rencana proses pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan kondisi ABK dikelas tersebut. Disisi lain juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai difasilitasi langsung dari direktorat PLB serta orang tua ABK yang berada dikelas V membawakan guru pembimbing sendiri yang sering disebut sedo⁶.

Persamaan dari penelitian ini dengan yang akan dipeneliti bahas adalah mengangkat tentang pendidikan inklusi yang berada di sekolah dasar, hanya saja berbeda fokusnya. Penliti pertama berfokus pada implementasi pendidikan inklusi di 8 sekolah sedagkan peneliti kedua berfokus pada proses pembelajaran yang ada di kelas V salah satu sekolah di Yogyakarta. Dalam hal ini yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini yakni bagaimana model pelayanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di SDN Junrejo I Kota Batu, Jawa Timur, yang akan dibahas yakni model pendidikan inklusif apa yang dipakai, bagaimana penerapannya model pendidikan inklusif tersebut.

B. Pengertian Kata “ Model “

Model adalah pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan⁷. Model adalah pola atau acuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang diharapkan terwujud ke depannya. Sebagai contohnya yakni model pendidikan bagi anak kebutuhan khusus. Anak

⁶ Rindi Lelly Anggraini, “*Proses Pembelajaran Inklusi Untuk ABK KELAS V SD Negeri Giwangan Yogyakarta*”, 2014.

⁷<http://kbbi.web.id/model>, Diakses Tanggal 12 Maret 2017, Pkl 16.00.

berkebutuhan khusus dengan anak reguler mempunyai kebutuhan yang jauh berbeda. Anak berkebutuhan khusus harus mempunyai pelayanan pendidikan yang tidak sama dengan anak reguler. Jika anak reguler selalu mengikuti setiap pelayanan pendidikan yang ada, akan tetapi pelayanan bagi anak kebutuhan khusus dari penyelenggara pelayanan pendidikan harus menyesuaikan dengan ABK. Saat ini sekolah – sekolah diseluruh indonesia dihimbau untuk menerima anak berkebutuhan khusus, maka dari itu kementerian pendidikan mengeluarkan peraturan nomor 70 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Didalam pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus menggunakan salah satu model, yaitu full inklusi. Full inklusi merupakan model yang menyertakan siswa ABK untuk belajar di kelas reguler secara individu. Hal ini berguna untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam diri ABK tersebut, dan bisa juga untuk ajang bersosialisasi dengan lingkungan normal.

C. Model Pelayanan Pendidikan Anak berkebutuhan Khusus

Seiring perkembangan zaman, pendidikan terus menerus mengalami perubahan sebab hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat semakin lama sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak – anak mereka, tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus anak yang memiliki kondisi fisik, mental ataupun emosional yang berbeda dengan anak normal pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus juga

memerlukan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kekurangan mereka, pelayanan pendidikan tersebut antara lain⁸:

1. Model Pelayanan Pendidikan Segregasi

Model layanan pendidikan segregasi adalah model pelayanan pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan normal. Pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui model segregasi adalah penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal lainnya, dengan kata lain anak berkebutuhan khusus diberikan layanan pendidikan pada lembaga pendidikan khusus seperti, sekolah luar biasa atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa. Model pelayanan pendidikan segregasi ini model layanan pendidikan pertama bagi anak berkebutuhan khusus. Model layanan pendidikan segregasi ini diselenggarakan karena adanya kekhawatiran atau keanekaragaman terhadap kemampuan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama anak normal pada umumnya, selain itu juga anak berkebutuhan khusus memiliki metode tersendiri dalam proses pembelajaran. Contoh anak tunarungu memerlukan komunikasi total serta pembinaan untuk mendengar bunyi.

2. Model Pelayanan Pendidikan Intregatif/Terpadu

Memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama – sama dengan anak normal lainnya disekolah reguler.

Anak berkebutuhan khusus juga hanya diikutkan dalam kurikulum

⁸*Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jendral Pendidikan Dasar : 2015, hlm. 5.

pelajaran yang hanya dapat mereka ikuti dari gurunya, untuk kurikulum pelajaran yang tidak bisa mereka ikuti ada penggantian pelajaran namun dipisahkan dengan anak normal lainnya. Sekolah reguler yang memakai pelayanan pendidikan integratif/terpadu ini mengharuskan ABK yang mengikuti sistem pendidikan disekolah reguler tersebut bukan sekolah yang menyesuaikan dengan kebutuhan ABK.

3. Model Pelayanan Pendidikan Inklusif

Menurut Permendiknas No 70 tahun 2009, dalam model ini semua peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan disekolah reguler atau umum. Tujuan dari model pelayanan pendidikan inklusif untuk memberikan kesempatan yang seluas – luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Di lingkungan inklusif inilah semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa akan memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pendidikan inklusif memiliki dua model, yakni⁹:

1. Model full inklusi

Model ini menyertakan siswa ABK dalam kelas reguler untuk menerima pembelajaran individual dalam kelas reguler.

2. Model inklusif parsial

⁹Ibid, *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif*, hlm 6.

Mengikutsertakan siswa ABK belajar di kelas reguler, namun sebagian proses belajar akan ditarik dari kelas reguler untuk belajar dikelas sumber bersama GPK.

Indonesia menyelenggarakan model pendidikan inklusif sendiri yakni model pendidikan moderat , yang dimaksud dengan model pendidikan moderat yakni:

1. Model pendidikan terpadu dan model full inklusi

Model pendidikan terpadu yang menerima siswa ABK bersekolah disekolah reguler yang harus menyesuaikan dengan sekolah dipadukan dengan model full inklusi yang memang mengikutsertakan siswa ABK belajar dikelas reguler.

2. Model Mainstreaming

Model yang memadukan antara pendidikan segregasi dengan pendidikan reguler. Pendidikan segregasi seperti yang dijelaskan diatas yakni model pendidikan pertama bagi ABK dengan diwujudkan sekolah luar biasa. Model maintreaming hanya akan mengikutsertakan siswa ABK ke sekolah reguler untuk beberapa waktu.

Namun pada dasarnya membuat model pelayanan pendidikan inklusif bagi siswa ABK akan dikembalikan lagi pada pihak sekolah dalam menentukan model pendidikan inklusif yang mana saja atau membuat model baru, sebab pihak sekolah yang betul – betul mengetahui kondisi langsung siswa ABK yang mendaftar ke sekolah mereka.

Saat ini sekolah reguler dalam memberikan kesempatan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus banyak yang menggunakan model

pelayanan pendidikan inklusif, hal ini juga ditunjang dengan adanya peraturan kementerian pendidikan pada tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif yang menghimbau seluruh sekolah reguler dapat menerima siswa – siswi berkebutuhan khusus disekolahnya. Dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif sekolah juga harus menyiapkan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan siswa – siswi ABK dapat berpindah dalam satu bentuk pelayanan pendidikan ke pelayanan pendidikan lainnya, dan bentuk pelayanan pendidikan tersebut terdiri dari¹⁰:

1. Kelas reguler

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak non berkebutuhan khusus (anak normal) sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama namun duplikasi atau perubahan materi belajar.

2. Kelas reguler dengan *cluster*(Pengelompokkan)

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus (anak normal) dikelas reguler dalam kelompok khusus.

3. Kelas reguler dengan *pull out*(Mengerluarkan)

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak non berkebutuhan (anak normal) dikelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler dan belajar ke ruang khusus untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

¹⁰ Wrastari Tri, Aryani, *Sikap Guru Terhadap Pendidikan Inklusi Ditinjau Dari Faktor Pembentuk Sikap*, Jurnal Psikologi Perkembangan dan Pendidikan, Vol2 No.01, Februari 2013 : 3.

4. Kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out* (Pengelompokan dan Mengeluarkan)

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak non berkebutuhan khusus (anak normal) dikelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang khusus untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

5. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian

Anak berkebutuhan khusus belajar didalam kelas khusus disekolah reguler, namun dalam bidang – bidang tertentu dapat belajar bersama anak non berkebutuhan khusus (anak normal) dikelas reguler.

6. Kelas khusus penuh

Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler.

Tabel 2.1
Perbedaan Inti Dari 3 Model Pendidikan Bagi ABK

❖ Perbedaan 3 Model Pelayanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
<ul style="list-style-type: none"> • Model pelayanan pendidikan segregasi terlihat jelas perbedaanya dengan 2 model pelayanan pendidikan lainnya. Sebab model segregasi menekankan bahwa anak berkebutuhan khusus bersekolah atau belajar di sekolah luar biasa atau (SLB). • Model pelayanan pendidikan integratif/terpadu perbedaannya dengan pendidikan inklusif terletak pada kurikulum pelajaran dan penerapan pelayanannya, jika pendidikan intregatif/terpadu mengharuskan ABK menyesuaikan diri dengan kondisi sekolah maka pendidikan inklusif sebaliknya. • Model pelayanan pendidikan inklusif memiliki perbedaan dengan pendidikan terpadu dari kurikulum pelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhannya serta sekolah reguler lah yang harus menyesuaikan kebutuhan setiap ABK.

Pendidikan inklusif juga sebagai pendekatan yang memerhatikan bagaimana respon guru reguler dan siswa dalam menerima keanekaragaman tersebut.

D. Pendidikan Inklusif

1. Konsep Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan suatu sistem layanan pendidikan khusus yang semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah terdekat, di kelas biasa bersama teman – teman sebayanya, maka dari itu diperlukan adanya struktur organisasi pendidikan inklusif di sekolah sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus bagi setiap anak berkebutuhan khusus¹¹.

Konsep pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang mempresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara Pendidikan inklusif didefinisikan sebagai konsep yang menampung semua anak berkebutuhan khusus ataupun anak yang memiliki kesulitan dalam membaca dan menulis. Pendidikan inklusif merupakan suatu strategi yang dapat mempromosikan pendidikan universal yang efektif sebab dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat¹². Dengan kata lain, pendidikan inklusif menjamin akses dan kualitas diri pada anak sesuai dengan tingkat kemampuan masing – masing dan menjamin kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan baik.

¹¹ N. Praptiningrum, “ *Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan khusus* “. Jurnal Pendidikan Khusus. Vol.2 No.2, November 2010, 34.

¹² Ilahi, *Op.Cit*, hl. 24.

Menurut Direktorat Pembinaan SLB, pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama – sama disekolah umum dengan memerhatikan keberagaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal. Pendidikan inklusif memberikan akses yang seluas- luasnya kepada semua anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan memberikan layanan pendidikan yang sesuai kebutuhannya¹³.

Permendiknas no 70 tahun 2009 menyebutkan, pendidikan inklusif sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama – sama dengan peserta didik pada umumnya. Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas – luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Di Indonesia sendiri, pendidikan inklusif secara resmi didefinisikan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal sebaya mereka.

¹³ Direktorat Pendidikan SLB, Dalam Garinda, *Op.Cit*, hlm.48.

Pendidikan inklusi menuntut pihak sekolah agar melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan inidividu peserta didik (Direktorat PSLB,2004)¹⁴.

Maka dari itu melalui pendidikan inklusif semua orang adalah bagian yang berharga dalam kebersamaannya tanpa memandang apapun perbedaan mereka. Dalam pendidikan inklusif terlepas dari ketidakmampuan anak berkebutuhan khusus, mereka diberikan kesempatan yang luas untuk belajar bersama dengan anak normal lainnya. Dalam penyelenggaraannya semua warga sekolah harus memberikan rasa aman, nyaman, dan senang kepada ABK.

2. Landasan Pendidikan Inklusif

Landasan adanya pendidikan inklusif tidak terlepas dari adanya pandangan terhadap anak berkebutuhan khusus yang akan mengenyam bangku sekolah. Bagi masyarakat umum anak berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah luar biasa (SLB) dan tidak bisa masuk di sekolah umum lainnya. Landasan yang digunakan dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusif tidak terlepas dari landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan empiris¹⁵.

a) Landasan Filosofis

Secara filosofis, penyelenggaraam pendidikan inkusif dapat dijelaskan sebagai berikut :

¹⁴ Direktorat PSLB, Dalam Ilahi, *Op.Cit*, hlm. 26.

¹⁵ Garinda, *Pengantar Pendidikan Inklusif*, Bandung : PT Refika Aditama : 2015, hlm.44.

- Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara Burung Garuda yang berarti *Bhineka Tunggal Ika*. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Pandangan Agama, dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang satu sama lain berbeda. Tuhan menciptakan manusia berbeda satu sama lain agar saling berhubungan dan saling melengkapi dengan segala aspek keberbedaannya (QS Al-Hujarat (49):13).
- Pandangan universal hak azasi manusia, menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesatuan, hak, pekerjaan.
- Pendidikan yang berkaitan langsung dengan relasi sosial antarsesama dalam upaya membangun kebersamaan tanpa memandang latar belakang kehidupan maupun status sosialnya.

b) Landasan Yuridis

Landasan yuridis atau hukum tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif tercantum pada peraturan kementerian pendidikan nasional no. 70 tahun 2009 yang menyatakan pada pasal (1) “dalam peraturan ini, yang dimaksud pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki

kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama – besama dengan peserta didik pada umumnya”. Pasal (2) “pendidikan inklusif bertujuan : Ayat (1) memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada semua anak peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Ayat (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik”. Pasal (3) ayat (1) “setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya”¹⁶.

c) Landasan Pendidikan

Pada pasal 3 Undang - Undang No. 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Maka, melalui pendidikan anak berkebutuhan khusus dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yang artinya menjadi individu yang mampu menghargai perbedaan dan

¹⁶ Undang – undang No. 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal anak berkebutuhan khusus diisolasi dari teman sebayanya dan disekolahkan di SLB. Betapun kecilnya kemampuannya anak berkebutuhan khusus harus diberi kesempatan bersama teman sebayanya di sekolah normal¹⁷.

d) Landasan Empiris

Penelitian tentang inklusif telah banyak dilakukan dinegara – negara barat sejak 1980-an, namun penelitian yang berskala besar dipelopori oleh *The National Academy of Sciences* (Amerika Serikat). Hasil menunjukkan bahwa kalsifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif¹⁸.

3. Tujuan Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi tidak bermaksud untuk mencampuradukkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya, melainkan berupaya dalam memberikan kesempatan kepada mereka yang mengalami keterbatasan agar juga bisa mengenyam pendidikan secara layak dan memberikan jaminan masa depan yang lebih cerah¹⁹.

Beberapa hal yang perlu dicermati lebih lanjut tentang tujuan pendidikan inklusi, yaitu:

- a. Memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh

¹⁷ Alfian, “ Pendidikan Inklusif di Indonesia “, Jurnal Pendidikan Biologi, (Jambi : 2013), 74.

¹⁸ Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif, *Op.Cit*, hlm.12

¹⁹ Ilahi. *Op.Cit*, hlm. 39.

pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik²⁰.

Adapun satu tujuan utama pendidikan inklusi adalah mendidik anak berkebutuhan khusus bersama di kelas reguler dengan anak normal lainnya, dengan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya disekolah maupun di lingkungan rumahnya.

4. Prinsip Pendidikan Inklusi

- a. Pendidikan inklusi membuka kesempatan kepada semua siswa

Pendidikan inklusi mempresentasikan pihak yang termarginalkan dan terbelakang dari lingkungannya. Representasi pendidikan inklusi bukan saja menolak diskriminasi dan ketidakadilan, melainkan pula memperjuangkan hak asasi manusia yang terbelenggu oleh hegemoni penguasa.

- b. Pendidikan inklusi menghindari semua aspek negatif *labeling*

Prinsip dasar yang menjadi karakter pendidikan inklusi adalah menghindari segala sesuatu yang berkaitan dengan pelabelan atau *labeling*. Salah satu dampak buruk dari *labeling* adalah munculnya keminderan atau kurang percaya diri bagi yang diberi *labeling*. Dengan adanya *labeling* akan mengganggu setiap aspek kehidupan mereka termasuk pendidikan. Secara konkret, pendidikan inklusi berupaya menghindari label negatif

²⁰ Ilahi, *Loc.Cit*, hlm 39.

dengan mengubah label yang ada di masa lalu menjadi lebih positif di masa ini.

c. Pendidikan inklusi selalu melakukan *checks* dan *balances*

Salah satu keuntungan dari kehadiran pendidikan inklusi adalah selalu melakukan *cheks* (memeriksa) dan *balance* (keseimbangan). Kehadiran pendidikan inklusi bukan sekedar sebagai konsep percobaan yang hanya muncul dalam wacana belaka, melainkan bisa menjadi konsep ideal yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis *cheks* dan *balance*²¹. Dilakukannya *cheks* dan *balance* ini bermaksud memberikan akses dan kualitas pendidikan yang baik khususnya bagi anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler dengan pendidikan inklusif.

5. Komponen Keberhasilan Pendidikan Inklusif

Setiap komponen keberhasilan pendidikan inklusif tidaklah bertentangan satu sama lain, tetapi saling berkaitan dan menentukan segala aspek yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan belajar anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang dapat membentuk karakter warga negara yang demokrasi dan bertanggung jawab. Semua komponen pendukung dan penentu keberhasilan pembelajaran di kelas, sebisa mungkin perlu dipersiapkan dan dikondisikan agar anak berkebutuhan khusus tidak diperlakukan diskriminatif. Oleh karena itu penting kiranya

²¹ Ilahi, *Ibid.* hlm. 51-52.

mengetahui komponen apa saja yang menjadi penentu keberhasilan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus²².

a. Flesibilitas Kurikulum (Bahan Ajar)

Menurut S. Nasution, kurikulum merupakan salah satu komponen penting pada lembaga pendidikan formal yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan isi pengajaran, mengarahkan proses mekanisme pendidikan, tolak ukur keberhasilan, dan kualitas hasil pendidikan. Namun demikian kurikulum sering kali tidak mampu mengikuti kecepatan laju perkembangan masyarakat. Pengembangan dan pembenahan kurikulum harus senantiasa dilakukan secara berkesimbangan dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman.

Kurikulum pendidikan inklusi menggunakan kurikulum sekolah reguler (kurikulum nasional) yang dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus, dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kecerdasannya. Dengan demikian kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus dapat dipilah menjadi, pertama anak dengan kemampuan akademik rata-rata dan di atas tinggi disiapkan kurikulum normal, kedua anak dengan kemampuan akademik sedang (dibawah rata-rata) disiapkan kurikulum fungsional/vokasional, ketiga anak dengan kemampuan akademik sangat rendah disiapkan kurikulum khusus untuk meminimalisasi penghalang pada setiap ABK sebelum belajar menggunakan kurikulum yang sudah disesuaikan.

b. Tenaga Pendidikan (Guru)

²² Ilahi, *Ibid*, hlm 165-179.

Faktor penentu keberhasilan pendidikan inklusif yang tidak kalah penting adalah adanya tenaga pendidik atau guru yang profesional dalam bidangnya masing-masing untuk membina dan mengayomi anak berkebutuhan khusus. Tenaga pendidik atau guru yang mengajar hendaknya memiliki klasifikasi yang dipersyaratkan, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang materi yang akan diajarkan dan memahami karakteristik siswa.

Sebagaimana diketahui peran guru sangat vital dalam mengatur segala proses dan perencanaan pembelajaran sampai pada tahap evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti setiap materi belajar.

E. Anak Berkebutuhan Khusus

1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus (ABK) dapat dimaknai dengan anak – anak yang tergolong cacat atau yang menyandang ketunaan, dan juga anak potensial dan berbakat²³. Seiring berjalannya waktu dengan munculnya pendidikan inklusif sebagai perubahan besar bagi anak berkebutuhan khusus untuk menerima pendidikan yang lebih baik serta menghilangkan kesan negatif terhadap mereka. Penggantian istilah dari cacat atau anak luar biasa ke istilah anak berkebutuhan khusus bukan semata – mata hanya sekedar menggantinya, namun memiliki tujuan yakni agar seluruh warga

²³ Mulyono Dalam Ilahi, *Ibid.* hlm. 137.

Indonesia memandang lebih luas dan positif terhadap keberagaman kebutuhan mereka yang berbeda dengan orang normal pada umumnya²⁴.

Anak berebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berebutuhan khusus mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan, oleh sebab itu mereka anak berebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing – masing anak. Secara umum anak berebutuhan khusus meliputi dua kategori, yakni²⁵ :

1. Bersifat permanen : akibat dari kelainan tertentu
2. Bersifat temporer (sementara) : mereka yang mengalami hambatan belajar dan berkembang yang disebabkan kondisi dan situasi tertentu.

Anak berebutuhan khusus yang bersifat temporer atau sementara adalah anak yang memiliki hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor – faktor eksternal, contohnya anak yang mengalami gangguan emosi karena frustrasi akibat mengalami pemerkosaan sehingga memungkinkan anak tidak dapat belajar dengan tenang²⁶. Dalam penanganan anak berebutuhan khusus yang temporer atau sementara harus ada kesadaran dari keluarga atau orang – orang terdekat untuk memberikan penyembuhan yang bisa mengembalikan kondisi kejiwaannya dengan cara bisa dibawa ke psikolog. Sedangkan anak berebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak yang

²⁴ Sunanto Dalam Ilahi, *Loc.Cit.* hlm. 137.

²⁵ Garnida, *Op.Cit*, hlm. 1-2.

²⁶ Ilahi, *Op.Cit*, hlm.139.

memiliki hambatan belajar dan perkembangan akibat langsung karena kecacatan atau bawaan sejak lahir.

Setiap anak berkebutuhan khusus, baik yang temporer maupun permanen memiliki perkembangan hambatan belajar dan kebutuhan belajar yang berbeda –beda. hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak, disebabkan oleh 3 hal, yaitu:

1. Faktor lingkungan.
2. Faktor dalam diri anak sendiri.
3. Faktor antara lingkungan dan faktor dalam diri anak.

2. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

Menurut klasifikasi dan jenis kelainan, anak berkebutuhan khusus dikelompokkan ke dalam kelainan fisik, kelainan mental, dan kelainan karakteristik sosial²⁷.

1. Kelainan Fisik

Kelainan fisik adalah kelainan yang terjadi pada satu atau lebih organ tubuh tertentu. Akibat kelainan tersebut timbul suatu keadaan pada fungsi fisik tubuhnya dan tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal. Tidak berfungsinya keadaan fisik ini bisa terjadi pada : alat fungsi indra, misalnya kelainan pada indra pendengaran (tunarungu), kelainan pada indra penglihatan (tunanetra), kelainan pada fungsi organ bicara (tunawicara), alat motorik tubuh, misalnya kelainan otot dan tulang (poliomyelitis), kelainan pada sistem saraf di otak yang berakibat

²⁷ Nandiyah Abdullah, “ Mengenai Anak Berkebutuhan Khusus “, dalam Magistra, No.86, Desember 2013 (Klaten : UNWIDHA, 2013), hlm. 1-6.

gangguan pada fungsi motorik (cerebral palsy), kelainan anggota badan akibat pertumbuhan yang tidak sempurna, misalnya lahir tanpa tangan / kaki, amputasi dan lain-lain, untuk kelainan pada alat motorik tubuh ini dikenal dalam kelompok tunadaksa.

2. Kelainan Mental

Anak berkebutuhan khusus dalam aspek kelainan mental adalah anak yang memiliki penyimpangan kemampuan dalam berpikir kritis, logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Anak dengan berkelainan mental ini bisa disebut juga dengan tunagrahita, yaitu anak yang didefinisikan memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya (di bawah normal) sehingga untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara khusus, terutama di dalamnya kebutuhan pendidikan dan bimbingannya. Kondisi anak tunagrahita seringkali di salah artikan dalam kehidupan sehari – hari. Persepsi masyarakat awam mengartikan anak tunagrahita terutama keluarga yang memiliki anak tunagrahita, yakni berharap dengan memasukkan anak tunagrahita ke lembaga pendidikan, kelak anaknya dapat berkembang sebagaimana anak normal pada umumnya.

Berdasarkan kapabilitas kemampuan yang dapat dirujuk sebagai dasar pengembangan potensi, anak tunagrahita dapat diklasifikasikan menjadi : (a) anak tunagrahita memiliki kemampuan untuk di didik dengan rentang IQ 50 – 75. (b) anak tunagrahita memiliki kemampuan untuk di

latih dengan rentang IQ 25 – 50. (c) anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan untuk dirawat dengan rentang IQ 25 kebawah.

3. Kelainan Perilaku sosial

Kelainan perilaku atau tunalaras sosial adalah mereka yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial, dan lain – lain. Klasifikasi anak yang termasuk dalam kategori mengalami kelainan perilaku sosial di antaranya anak *psychotic* dan *neurotic*, anak dengan gangguan emosi dan anak nakal (*deliquent*). Berdasarkan sumber terjadinya tindak kelainan perilaku sosial secara penggolongan disebabkan menjadi : (a) tunalaras emosi, yaitu penyimpangan perilaku sosial yang ekstrem sebagai bentuk gangguan emosi, (b) tunalaras sosial, yaitu penyimpangan perilaku sosial sebagai bentuk kelainan dalam penyesuaian sosial karena bersifat fungsional.

Pengklasifikasian anak berkebutuhan khusus sebagaimana yang dijelaskan diatas, jika dikaitkan dengan kepentingan pendidikan khususnya di Indonesia maka bentuk kelainan diatas dapat disedeharnakan sebagai berikut :

- (a) Bagian A adalah sebutan untuk kelompok anak tunanetra.
- (b) Bagian B adalah sebutan untuk kelompok anak tunarungu.
- (c) Bagian C adalah sebutan untuk kelompok anak tunagrahita.
- (d) Bagian D adalah sebutan untuk kelompok anak tunadaksa.
- (e) Bagian E adalah sebutan untuk kelompok anak tunalaras.
- (f) Bagian F adalah sebutan untuk kelompok anak diatas rata – rata.
- (g) Bagian G adalah untuk sebutan kelompok anak tunaganda.

F. Hak – Hak Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan, maka dari itu kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus menjadi prioritas yang sangat diutamakan. Namun tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak diantara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, tidak mendapatkan pendidikan yang terbaik, hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor semisal, keluarga yang miskin, orang tua bermasalah, diperlakukan salah oleh lingkungan sekitar, ditinggal orang tua, sehingga anak – anak tidak dapat menikmati hidup secara layak. Pemerintah dalam hal ini sudah mewujudkan melalui diterbitkannya undang – undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus terdapat pada pasal 49, pasal 50, dan pasal 51²⁸.

Isi dari undang – undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 49 yakni negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pasal 50 yakni a.) pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi yang optimal, b.) pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi, c.) pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya

²⁸ Undang – undang No. 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.

sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda dari peradaban sendiri, d.) persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab serta, e.) pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup. Pasal 51 yakni anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Dalam undang – undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ini juga dinyatakan bahwa anak memiliki 31 hak anak, yakni :

a. Anak mempunyai hak untuk (9 poin):

1. bermain
2. berkreasi
3. berpartisipasi
4. berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan
5. bebas beribadah menurut agamanya
6. bebas berkumpul
7. bebas berserikat
8. hidup dengan orang tua
9. kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

b. Untuk mendapatkan (7 poin) :

1. nama

2. identitas
3. kewarganegaraan
4. pendidikan
5. informasi
6. standar kesehatan paling tinggi
7. standar hidup yang layak

c. Untuk mendapatkan perlindungan (15 poin) :

1. pribadi
2. dari tindakan penangkapan sewenang-wenang
3. dari perampasan kebebasan
4. dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi
5. dari siksaan fisik dan non fisik
6. dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafiking
7. dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual
8. dari eksploitasi /penyalahgunaan obat-obatan
9. dari eksploitasi sebagai pekerja anak
10. dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil
11. dari pemandangan atau keadaan yg menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak
12. khusus, dalam situasi genting/darurat
13. khusus, sebagai pengungsi/orang yg terusir/tergusur
14. khusus, jika mengalami konflik hukum
15. khusus, dalam konflik bersenjata atau konflik sosial.

Selain itu anak juga berhak dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas, terutama bagi anak berkebutuhan khusus. Hal ini juga sudah diatur dalam undang – undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3²⁹ yakni pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang merbataban dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pasal 5 yakni a.) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, b.) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, c.) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, d.)Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, e.) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pasal 32 yakni a.) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, b.) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang,

²⁹ Undang – undang No. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasioan*.

masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi, c.) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

